



## PASCAKEBENARAN (POST-TRUTH) DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

### POST-TRUTH IN SOCIAL LIFE

Marhan Pebrianto<sup>1</sup>, Yatin Mulyono<sup>2</sup>

IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: marhanpebrianto4@gmail.com<sup>1</sup>, yatin.mulyono@iain-palangkaraya.ac.id<sup>2</sup>

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pascakebenaran dan dampaknya dalam konteks kehidupan sosial. Pascakebenaran, yang merupakan era di mana kebohongan dapat disamarkan sebagai kebenaran, telah mengubah lanskap informasi dan persepsi masyarakat. Artikel ini menelusuri konsep pascakebenaran dari sudut pandang filsafat dan kontekstual. Selain itu, dampaknya terhadap polarisasi sosial dan opini publik juga dieksplorasi. Polarisasi masyarakat semakin meningkat karena pascakebenaran memperkuat pemisahan antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Hal ini mempengaruhi opini publik, dimana emosi dan keyakinan pribadi seringkali diutamakan di atas fakta. Artikel ini juga membahas strategi pendidikan dan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari pascakebenaran. Peningkatan literasi media, transparansi informasi, pendidikan moral, dan kerja sama antara pemerintah, media, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pascakebenaran dan upaya untuk mengatasi dampaknya dalam kehidupan sosial.

**Kata Kunci:** pascakebenaran, kehidupan sosial, pendidikan.

#### ABSTRACT

*This research aims to analyze post-truth phenomena and their impact in the context of social life. Post-truth, which is an era where lies can be disguised as truth, has changed the information landscape and public perception. This article explores the concept of post-truth from a philosophical and contextual perspective. Additionally, its impact on social polarization and public opinion is also explored. The polarization of society is increasing because the post-truth strengthens divisions between groups with different views. This influences public opinion, where emotions and personal beliefs often take precedence over facts. This article also discusses educational and public policy strategies that can be used to address the negative impacts of post-truth. Increasing media literacy, information transparency, moral education, and cooperation between government, media, and educational institutions are the keys to facing this challenge. Thus, this article provides an in-depth understanding of the post-truth phenomenon and attempts to overcome its impact in social life.*

**Keywords:** post-truth, social life, education.

#### PENDAHULUAN

Fenomena pascakebenaran (post-truth) telah menjadi salah satu isu penting dalam kajian kehidupan sosial kontemporer. Istilah ini mengacu pada keadaan di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal dalam membentuk opini publik. Di era digital ini, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya telah mengubah cara kita

memperoleh dan memproses informasi. Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam menentukan kebenaran dan memelihara integritas informasi di tengah maraknya hoaks dan berita palsu.

Latar belakang fenomena pascakebenaran dapat ditelusuri dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses dan distribusi informasi. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi penyebaran



informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dipalsukan untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi yang disebarkan melalui media sosial sering kali lebih berfokus pada menarik perhatian dan memicu emosi daripada memberikan fakta yang akurat. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat membentuk persepsi mereka tentang kebenaran dan realitas.

Di dalam kehidupan sosial, dampak pascakebenaran sangat luas. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya polarisasi sosial. Masyarakat cenderung membentuk kelompok-kelompok yang berdasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang sama, seringkali mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana dialog dan perdebatan konstruktif menjadi sulit, karena setiap pihak lebih cenderung mempertahankan pandangannya sendiri daripada mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain.

Lebih lanjut, pascakebenaran juga mempengaruhi bidang politik dan pemerintahan. Kampanye politik sering kali memanfaatkan strategi pascakebenaran dengan menyebarkan informasi yang mengedepankan emosi dan keyakinan untuk meraih dukungan. Hal ini dapat mengaburkan fakta dan membuat pemilih sulit untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan mungkin tidak didasarkan pada kebutuhan dan realitas yang sebenarnya, tetapi lebih pada narasi yang dibentuk oleh emosi dan keyakinan.

Selain itu, dalam konteks keilmuan, pascakebenaran juga menghadirkan tantangan besar. Masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat cenderung meragukan temuan ilmiah dan otoritas akademik. Ini dapat menghambat

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kepercayaan publik terhadap sains dan penelitian menjadi terganggu. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi dan ilmuwan untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi dan validasi informasi.

Dalam rangka menghadapi tantangan pascakebenaran, diperlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pendidikan, kebijakan publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Literasi informasi harus ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal, yang menekankan pentingnya kritis dalam menyikapi informasi. Kebijakan publik juga harus diarahkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas informasi dengan cara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil tiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apa peran media sosial dalam penyebaran informasi pascakebenaran dan bagaimana hal ini mempengaruhi opini publik? 2) Mengapa fenomena pascakebenaran berdampak terhadap polarisasi sosial di masyarakat? 3) Bagaimana strategi pendidikan dan kebijakan publik dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari pascakebenaran dalam kehidupan sosial?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan buku dan jurnal



yang relevan untuk diteliti penulis. Artikel ini merupakan sebuah kajian pustaka dari beberapa pilihan artikel terkait, pencarian literature dilakukan dengan mencari artikel jurnal yang relevan. Beberapa penelitian juga dihasilkan dengan mencari daftar referensi melalui beberapa publikasi yang sudah teruji secara ilmiah. Demikian pula dengan buku yang sesuai diambil materi beserta informasinya<sup>1</sup>.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pascakebenaran (post-truth) telah menjadi subjek yang semakin relevan dalam konteks kehidupan sosial modern. Di era ini, fakta objektif sering kali kalah dengan keyakinan personal dan emosi dalam membentuk opini publik. Budaya pascakebenaran ini menciptakan lanskap informasi yang kompleks, di mana kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Artikel ini berusaha mengkaji dampak dan mekanisme fenomena pascakebenaran dalam kehidupan sosial serta implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan<sup>2</sup>.

Salah satu dampak signifikan dari pascakebenaran adalah dominasi emosi dan keyakinan personal dalam membentuk opini publik. Dalam konteks politik, misalnya, informasi yang disampaikan tidak selalu berbasis fakta, tetapi lebih pada bagaimana pesan tersebut dapat memengaruhi emosi audiens. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kampanye politik yang menggunakan strategi komunikasi yang menekankan aspek

emosional untuk memenangkan dukungan, mengabaikan fakta yang sebenarnya. Fenomena ini memperkuat polarisasi politik, di mana masyarakat menjadi lebih terpecah berdasarkan keyakinan subjektif mereka daripada fakta objektif<sup>3</sup>.

Media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat fenomena pascakebenaran. Platform-platform ini memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas tanpa adanya mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi yang tidak diverifikasi dan bahkan hoaks dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sering kali memprioritaskan konten yang memicu emosi, sehingga memperparah penyebaran informasi yang tidak akurat<sup>4</sup>.

Implikasi dari fenomena ini sangat luas, termasuk dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Di era pascakebenaran, kepercayaan terhadap sains dan akademisi sering kali tergerus oleh keyakinan personal yang didorong oleh informasi yang tidak diverifikasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, karena masyarakat menjadi kurang percaya pada penelitian yang berbasis fakta. Oleh karena itu, penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kebenaran objektif melalui pendidikan kritis yang menekankan pentingnya literasi informasi dan

<sup>1</sup> Rifa Zakiah Mahmudah and Mulyawan Safwandi Nugraha, "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1, no. 4 (July 2023): 148–61, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.737>.

<sup>2</sup> Mohammad Refi Omar Ar Razy and Mumuh Muhsin Zakaria, "Truth & Post Truth Dewasa Ini," *SOSFILKOM* 15, no. 02 (2021): 19–35.

<sup>3</sup> Zainul Adzfar and Badrul Munir Chair, "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 165–82, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.12596>.

<sup>4</sup> Cevi Mochamad Taufik and Nana Suryana, *Media, Kebenaran, Dan Post-Truth*, ed. Ling Saefudin (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).



kemampuan untuk menganalisis sumber informasi dengan cermat<sup>5</sup>.

Urgensi kebajikan intelektual juga menjadi sangat penting dalam menghadapi era pascakebenaran. Epistemologi kebajikan yang dikemukakan oleh Linda Zagzebski menekankan perlunya kecakapan intelektual dan kebajikan dalam mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya. Hal ini termasuk kemampuan untuk mempertanyakan sumber informasi, memahami konteks, dan mengevaluasi bukti dengan kritis. Kebajikan intelektual ini tidak hanya penting bagi individu tetapi juga bagi masyarakat luas untuk membangun kembali kepercayaan terhadap kebenaran objektif dalam kehidupan sosial<sup>6</sup>.

### **Peran Media Sosial**

Media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyebaran informasi di era pascakebenaran. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat dan luas, seringkali tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini memungkinkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan untuk tersebar luas sebelum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Fenomena ini dikenal sebagai pascakebenaran, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih mempengaruhi opini publik dibandingkan dengan fakta objektif.

Dalam konteks pascakebenaran, media sosial sering kali menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang memanipulasi

emosi dan keyakinan individu. Algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chambers, di mana pengguna lebih sering disajikan dengan konten yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, memperkuat bias konfirmasi dan polarisasi sosial. Akibatnya, individu lebih cenderung percaya pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, meskipun informasi tersebut tidak benar<sup>7</sup>.

Opini publik sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersebar di media sosial. Informasi yang menyebar luas dan cepat dapat membentuk persepsi publik mengenai isu-isu tertentu, baik itu dalam politik, kesehatan, maupun isu-isu sosial lainnya. Misalnya, selama pemilu, informasi yang salah atau menyesatkan tentang kandidat dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan, pada akhirnya, hasil pemilu.

Selain itu, media sosial juga mempengaruhi partisipasi politik. Dengan adanya informasi yang tersebar luas dan cepat, masyarakat lebih mudah terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka. Namun, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan misinformasi dan disinformasi, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan dan tindakan politik individu<sup>8</sup>.

Secara keseluruhan, media sosial memainkan peran yang krusial dalam penyebaran informasi di era pascakebenaran dan memiliki dampak signifikan terhadap opini publik. Penting bagi pengguna media sosial untuk memiliki literasi informasi yang

<sup>5</sup> Herdito Sandi Pratama, "Urgensi Kebajikan Intelektual Di Era Pascakebenaran: Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebajikan Linda Zagzebski," *RESPONS* 23, no. 2 (2018): 167–84.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Muhammad Qadri, "PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, n.d.

<sup>8</sup> Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, and Nur Riswandi Marsuki, "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (March 2024): 38–45, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>.



baik dan kritis terhadap informasi yang mereka terima dan sebar<sup>9</sup>.

## Dampak Pascakebenaran Dalam Kehidupan Sosial

Fenomena pascakebenaran berdampak signifikan terhadap polarisasi sosial di masyarakat karena berbagai alasan. Pertama, pascakebenaran mengacu pada keadaan di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Media sosial sering kali memfasilitasi penyebaran informasi yang memicu emosi, yang memperkuat bias konfirmasi pengguna dan memperkuat pandangan yang sudah ada, sehingga memperdalam perbedaan pendapat di masyarakat.

Kedua, perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah menciptakan lingkungan di mana debat rasional dan emosional semakin bercampur. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna, menciptakan echo chambers di mana informasi yang berbeda atau bertentangan jarang terlihat. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi semakin terpolarisasi, karena setiap kelompok hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri<sup>10</sup>.

Ketiga, di era pascakebenaran, informasi yang tidak didasarkan pada bukti sering kali lebih menarik dan mudah disebarluaskan. Ini menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan berdasarkan informasi

yang tidak akurat atau sengaja disalahartikan. Polarisasi ini semakin diperparah oleh peran media massa dan media sosial dalam menyebarkan narasi yang memecah belah, yang sering kali digunakan untuk tujuan politik atau komersial.

Keempat, fenomena pascakebenaran juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi tradisional seperti media arus utama, pemerintah, dan akademisi. Ketika masyarakat lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, meskipun tidak berdasar fakta, mereka cenderung memandang pihak lain sebagai musuh atau tidak dapat dipercaya. Ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara berbagai kelompok dalam masyarakat, memperkuat polarisasi sosial<sup>11</sup>.

Secara keseluruhan, fenomena pascakebenaran memperkuat polarisasi sosial melalui penyebaran informasi yang memanipulasi emosi, memperkuat bias, dan mengikis kepercayaan pada institusi tradisional, sehingga menciptakan masyarakat yang semakin terpecah.

## Strategi dalam Mengatasi Dampak Negatif Pascakebenaran

Strategi pendidikan dan kebijakan publik dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi dampak negatif dari fenomena pascakebenaran dalam kehidupan sosial melalui beberapa cara berikut:

1) Peningkatan Literasi Media dan Informasi  
Pendidikan harus fokus pada meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat. Ini termasuk

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Dominic Malcolm, "Post-Truth Society? An Eliasian Sociological Analysis of Knowledge in the 21st Century," *Sociology* 55, no. 6 (December 1, 2021): 1063–79, <https://doi.org/10.1177/0038038521994039>.

<sup>11</sup> Shreeharsh Kelkar, "Post-Truth and the Search for Objectivity: Political Polarization and the Remaking of Knowledge Production," *Engaging Science, Technology, and Society* 5 (April 3, 2019): 86–106, <https://doi.org/10.17351/ests2019.268>.



mengajarkan keterampilan kritis untuk mengevaluasi sumber informasi, mengenali berita palsu, dan memahami bias media. Program-program ini bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kampanye kesadaran masyarakat<sup>12</sup>.

## 2) Kebijakan Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan menyediakan akses mudah terhadap informasi yang akurat dan terpercaya, masyarakat dapat lebih baik membedakan antara fakta dan misinformasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah contoh kebijakan yang dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi yang benar.

## 3) Penguatan Pendidikan Moral dan Etika

Pendidikan harus menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan membangun karakter yang kuat, individu akan lebih cenderung menghargai kebenaran dan menolak informasi yang menyesatkan<sup>13</sup>.

## 4) Kolaborasi antara Pemerintah, Media, dan Institusi Pendidikan:

Pemerintah, media, dan institusi pendidikan harus bekerja sama dalam mempromosikan informasi yang akurat dan mengoreksi misinformasi. Kampanye bersama yang berfokus pada edukasi publik

tentang bahaya pascakebenaran dan pentingnya verifikasi fakta dapat membantu mengurangi dampak negatifnya<sup>14</sup>.

## 5) Pengembangan Kebijakan Publik yang Mendukung:

Kebijakan publik harus dirancang untuk mendukung pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini bisa termasuk investasi dalam teknologi pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan bahan ajar yang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini<sup>15</sup>.

Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, pendidikan dan kebijakan publik dapat menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan resilien terhadap pengaruh negatif dari pascakebenaran, sehingga memperkuat kohesi sosial dan demokrasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi pascakebenaran dengan memungkinkan informasi yang didasarkan pada emosi dan keyakinan pribadi menyebar lebih cepat dibandingkan fakta objektif. Hal ini dapat membentuk opini publik berdasarkan sentimen emosional daripada kebenaran faktual, menyebabkan distorsi persepsi dan mempengaruhi perilaku politik Masyarakat.

Fenomena pascakebenaran berkontribusi terhadap polarisasi sosial dengan memperkuat keyakinan yang telah ada dan memicu konflik antara kelompok dengan pandangan yang berbeda. Ketika fakta

<sup>12</sup> Maskuri, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA," *JPII* 2, no. 1 (October 2017): 78–91.

<sup>13</sup> Alber Tanjung et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (April 29, 2023): 545–51, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>.

<sup>14</sup> Mansurni Abadi et al., "STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (May 2023): 142–65, [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).

<sup>15</sup> Tanjung et al., "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik."



diabaikan dan emosi serta opini pribadi mendominasi diskursus publik, masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang semakin ekstrem dan sulit mencapai kesepakatan bersama.

Pendidikan dan kebijakan publik dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif pascakebenaran dengan:

1. Peningkatan Literasi Media dan Informasi,
2. Kebijakan Transparansi dan Keterbukaan Informasi,
3. Penguatan Pendidikan Moral dan Etika,
4. Kolaborasi antara Pemerintah, Media, dan Institusi Pendidikan,
5. Pengembangan Kebijakan Publik yang Mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Mansurni, Cenruang Alung, Iman Permadi, and Yana Schova. "STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (May 2023): 142–65.

[www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).

Adzfar, Zainul, and Badrul Munir Chair. "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 165–82. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.12596>.

Ar Razy, Mohammad Refi Omar, and Mumuh Muhsin Zakaria. "Truth & Post Truth Dewasa Ini." *SOSFILKOM* 15, no. 02 (2021): 19–35.

Juleha, Juleha, Jusfira Yuniar, and Nur Riswandi Marsuki. "Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital."

*Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1 (March 2024): 38–45.

<https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>.

Kelkar, Shreeharsh. "Post-Truth and the Search for Objectivity: Political Polarization and the Remaking of Knowledge Production." *Engaging Science, Technology, and Society* 5 (April 3, 2019): 86–106. <https://doi.org/10.17351/ests2019.268>.

Malcolm, Dominic. "Post-Truth Society? An Eliasian Sociological Analysis of Knowledge in the 21st Century." *Sociology* 55, no. 6 (December 1, 2021): 1063–79.

<https://doi.org/10.1177/0038038521994039>.

Maskuri. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA." *JPII* 2, no. 1 (October 2017): 78–91.

Pratama, Herdito Sandi. "Urgensi Kebijakan Intelektual Di Era Pascakebenaran: Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebijakan Linda Zagzebski." *RESPONS* 23, no. 2 (2018): 167–84.

Qadri, Muhammad. "PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, n.d.

Tanjung, Alber, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, and Syamsir Syamsir. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (April 29, 2023): 545–51. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>.



Taufik, Cevi Mochamad, and Nana Suryana.  
*Media, Kebenaran, Dan Post-Truth.*  
Edited by Ling Saefudin. Bandung:  
Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Mahmudah, Rifa Zakiah, and Mulyawan  
Safwandi Nugraha. “Manajemen  
Sumber Daya Manusia Dalam  
Perspektif Hadits.” *Jurnal Mahasiswa  
Kreatif* 1, no. 4 (July 2023): 148–61.  
[https://doi.org/10.59581/jmk-  
widyakarya.v1i3.737](https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.737).